

Editor :

Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

*Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si | Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si
Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si | Muhammad Arif, S.IP., M.I.K | Sumardi, S. IP., M.I.P
Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si | Drs. Itok Wicaksono, M.Si | Ferri Wicaksono, S.IP., M.A.
Amir Syamsuadi, S.IP., M.Si | Abdul Jabbar, S.I.P.,M.Si | Dr. Erfina, S. Sos., M. Si
Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si | Dr. Andi Tenri Sempa, SIP., M.Si
Muhammad Lutfi, S.IP., M.A | Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si*

PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si
Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si
Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si
Muhammad Arif, S.IP., M.I.K
Sumardi, S. IP., M.I.P
Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si
Drs. Itok Wicaksono, M.Si
Ferri Wicaksono, S.IP., M.A.
Amir Syamsuadi, S.IP., M.Si
Abdul Jabbar, S.I.P.,M.Si
Dr. Erfina, S. Sos., M. Si
Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si
Dr. Andi Tenri Somp, SIP., M.Si ✓
Muhammad Lutfi, S.IP., M.A
Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

Penulis : Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si|Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si|Muhammad Ikkal, S.Sos., M.Si |Muhammad Arif, S.I.P., M.I.K|Sumardi, S. IP., M.I.P|Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si| Drs. Itok Wicaksono, M.Si| Ferri Wicaksono, S.I.P., M.A. | Amir Syamsuadi, S.I.P., M.Si| Abdul Jabbar, S.I.P.,M.Si|Dr. Erfina, S. Sos., M. Si|Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si|Dr. Andi Tenri Sompia, SIP., M.Si|Muhammad Lutfi, S.I.P., M.A|Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si

Editor : Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Siwi Rimayani Oktora

ISBN : 978-623-487-095-4

No. HKI : EC00202260646

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, AGUSTUS 2022
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan buku ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini kami beri judul "Pengantar Ilmu Pemerintahan". Substansi yang perlu untuk dipelajari dalam memahami ilmu pemerintahan dipaparkan dalam buku ini. Penjelasan ilmu pemerintah yang diawali dengan membahas konsep dasar dari pemerintahan itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan konsep pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sistem pemerintahan juga dijelaskan, baik secara umum maupun khusus dari sistem pemerintahan di Indonesia. Urusan pemerintahan juga dibahas dari pemerintahan desa hingga pusat. Unsur demokrasi dalam pemerintahan juga tak lupa diberikan. Sehingga buku ini menjadi hal penting dalam mempelajari ilmu pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
BAB 1 KONSEP DASAR ILMU PEMERINTAHAN & RUANG	
LINGKUP ILMU PEMERINTAHAN	1
A. Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan.....	1
B. Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan.....	9
Daftar Pustaka	13
Tentang Penulis	15
BAB 2 HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DENGAN	
ILMU LAIN	17
A. Pendahuluan.....	17
B. Pengertian dan lingkup Ilmu Pemerintahan	21
C. Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Negara.....	23
D. Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Politik.....	24
E. Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu	
Administrasi Negara/Ilmu Administrasi Publik.....	25
F. Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Hukum	
Ketata Negara.....	26
G. Kesimpulan.....	27
Daftar Pustaka	29
Tentang Penulis	31
BAB 3 ASAS ASAS PEMERINTAHAN	32
A. Pengertian Asas Pemerintahan.....	32
B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	35
C. Penjelasan Hukum Asas Asas Umum Pemerintahan	
yang Baik	41
Daftar Pustaka	47
Tentang Penulis	49
BAB 4 SISTEM PEMERINTAHAN	50
A. Konsep Sistem Pemerintahan	50
B. Pembagian Sistem Pemerintahan	58

Daftar Pustaka	71
Tentang Penulis.....	73
BAB 5 MAZHAB PEMERINTAHAN.....	74
A. Mazhab Pemerintahan	74
B. Kontestasi Mazhab Pemerintahan.....	77
C. Mazhab Pemerintahan Baru, Memperkuat dan	
Pengembangan Cara Pandang Ilmu Pemerintahan.....	82
Daftar Pustaka	89
Tentang Penulis.....	94
BAB 6 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA	95
A. Pembentukan Pemerintahan Indonesia.....	95
B. Sistem Pemerintahan di Indonesia.....	98
Daftar Pustaka	105
Tentang Penulis.....	106
BAB 7 PROBLEMATIKA DESENTRALISASI DAN	
DEKONSENTRASI DI INDONESIA.....	107
A. Pendahuluan.....	107
B. Desentralisasi dan Dekonsentrasi	108
C. Problematika Desentralisasi dan Dekonsentrasi.....	110
D. Alternatif Mengatasi Problem Desentralisasi dan	
Dekonstrasi.....	113
E. Penutup	115
Daftar Pustaka	117
Tentang Penulis.....	118
BAB 8 PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN	
DAERAH	119
A. Konsekuensi Bentuk Negara Kesatuan.....	119
B. Organisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah.....	120
C. Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah	127
D. Klasifikasi Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah ...	129
E. Penutup	137
Daftar Pustaka	138
Tentang Penulis.....	140
BAB 9 PEMERINTAHAN DESA	141
A. Terminologi Pemerintahan Desa.....	141

B. Sejarah Perkembangan dan Dinamika Regulasi Pemerintahan Desa	144
C. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	152
D. Struktur Kelembagaan dan Fungsi Pemerintahan Desa	155
Daftar Pustaka	161
Tentang Penulis	165
BAB 10 KONSEP GOOD GOVERNANCE	167
A. Konsep <i>Good Governance</i>	167
B. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	170
C. Tujuan dan Manfaat <i>Good Governance</i>	173
D. Urgensi <i>Good Governance</i>	175
Daftar Pustaka	180
Tentang Penulis	181
BAB 11 ETIKA PEMERINTAHAN	183
A. Konsep Dasar Etika Pemerintahan	183
B. Pentingnya Etika dan Permasalahannya	185
C. Etika Cabang Ilmu Filsafat	186
D. Faktor yang Memengaruhi Etika	188
E. Al-Qur' An sebagai Sumber Etika	190
F. Ruang Lingkup Etika Pemerintahan	193
Daftar Pustaka	199
Tentang Penulis	201
BAB 12 NEGARA	202
A. Terminologi Negara	202
B. Sejarah Negara	203
C. Jenis-Jenis Negara	205
Daftar Pustaka	211
Tentang Penulis	213
BAB 13 DEMOKRASI	214
A. Definisi Demokrasi	214
B. Sejarah Demokrasi	216
C. Praktik-praktik Utama Demokrasi	223
Daftar Pustaka	225
Tentang Penulis	226
BAB 14 KEKUASAAN	227

A. Pengertian Kekuasaan	227
B. Sumber-Sumber Kekuasaan	229
C. Dimensi-Dimensi Kekuasaan	232
D. Wewenang (<i>Authority</i>) dan Legitimasi (<i>Legitimacy</i>)	235
E. Kekuasaan dalam Konteks Lokal	238
Daftar Pustaka	241
Tentang Penulis	242
BAB 15 KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN	243
A. Pemimpin dan Kepemimpinan	243
B. Kepemimpinan dan Kekuasaan	250
C. Kepemimpinan dan Inovasi	255
Daftar Pustaka	258
Tentang Penulis	262

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan dan Persamaan Objek Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu-Ilmu Lainnya.....	20
Tabel 8.1	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	123
Tabel 8.2	Klasifikasi Organisasi Perangkat Daerah Berdasar Beban Kerja	123
Tabel 8.3	Klasifikasi Urusan Pemerintahan	130
Tabel 8.4	Substansi Urusan Pemerintahan Absolut dan Umum.....	131
Tabel 8.5	Substansi Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan...	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Hubungan AUPB dan Asas penyelenggaraan pemerintahan.....	39
Gambar 10.2	Pilar Utama Good Governance	176
Gambar 15.1	Teori Jalur-Tujuan	246

DAFTAR BAGAN

Bagan 8.1 Hubungan Kemitraan antara Kepala Daerah dengan DPRD.....	122
Bagan 8.2 Tujuan Negara Indonesia	124
Bagan 8.3 Manajemen Pelayanan Publik.....	125
Bagan 8.4 Asas - Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.....	126
Bagan 8.5 Pola Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	128
Bagan 8.6 Mekanisme Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	135
Bagan 8.7 Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Pusat ke Daerah.....	136

BAB 1

KONSEP DASAR ILMU PEMERINTAHAN & RUANG LINGKUP ILMU PEMERINTAHAN

Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Email : ahmadmustanir74@gmail.com

A. Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan

1. Definisi Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan adalah sebuah ilmu dan juga seni. Disebut sebagai sebuah seni karena ada banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa memiliki dasar pendidikan pemerintahan, tetapi mampu berkiat serta dengan kharismaniknya menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan, karena mampu memenuhi syarat- syarat yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materia maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta memiliki kekhasan.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata "perintah" tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Dengan demikian perintah adalah perkataan yang dimaksudkan untuk menyuruh dalam melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah. Pemerintah adalah perbuatan (cara, urusan dan sebagainya) memerintah.

Jika dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan, dipisahkan atau dibagi maka akan terdapat perbedaan antara

BAB 13 | DEMOKRASI

Dr. Andi Tenri Somba, SIP., M.Si
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Email : tenri@ulm.ac.id

A. Definisi Demokrasi

Demokrasi, secara harfiah, pemerintahan oleh rakyat. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *dēmokratia*, yang diambil dari kata *dēmos* (rakyat) dan *kratos* (aturan). Di pertengahan abad ke-5 SM istilah ini mulai lazim digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang saat itu ada di beberapa negara kota (*polis*), terutama Athena (Dahl, 2013). Jika berbicara definisi demokrasi secara lebih lengkap banyak arti yang melekat pada kata demokrasi. Jika ada satu yang benar artinya maka itu, memang, seperti yang diungkapkan oleh Platon, “disimpan di surga”. Demokrasi merupakan konsep yang oleh beberapa filsuf disebut sebagai konsep yang diperdebatkan definisinya.²

Demokrasi merupakan salah satu istilah yang tidak akan pernah bisa didefinisikan dengan mudah karena definisi dan esensi demokrasi memiliki perbedaan sosial, moral, budaya serta juga politik. Tidak ada definisi mutlak tentang demokrasi. Istilahnya sangat elastis dan mengembang serta menyesuaikan menurut waktu, tempat dan keadaan penggunaannya. Meskipun demikian, berikut adalah beberapa deskripsi definisi demokrasi yang diberikan oleh para ahli.

² Crick, B. (2002). *Democracy: A very short introduction*. OUP Oxford.

Menurut Crick (2003) demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana undang-undang, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha-usaha yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh “rakyat” – sebuah kelompok yang umumnya dipahami mencakup semua (atau hampir semua) warga negara yang sudah dewasa.³ Andrew Heywood (2017) mendefinisikan demokrasi sebagai *rule by the people; democracy implies both popular participation and government in the public interest, and can take a wide variety of forms* (pemerintahan oleh rakyat; demokrasi menyiratkan partisipasi rakyat dan pemerintah untuk kepentingan publik, serta memiliki beberapa makna yang beragam).⁴ Sementara John Hirst (2002) menyatakan bahwa demokrasi adalah masyarakat di mana warga negara berdaulat dan mengendalikan pemerintah (*A democracy is a society in which the citizens are sovereign and control the government*).⁵

Definisi yang cukup menarik diberikan oleh Jim Kilcullen yakni demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, sementara oligarki berarti pemerintahan oleh segelintir orang. Jadi penerapan demokrasi jika, urusan pemerintahan/negara/wilayah ada pada majelis (*assembly*), yang menjadi milik semua warga negara dan di mana keputusan dibuat dengan suara mayoritas sederhana (*simple majority vote*). Joseph Schumpeter (2013) menambahkan deskripsi demokrasi yang terkait secara khusus pada metode demokrasi, menurutnya, metode demokrasi adalah pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik dimana individu memiliki kewenangan untuk memutuskan. Schumpeter (2013) juga menyatakan bahwa tujuan dari metode

³ Britannica. 2021. *Know about democracy, its history, and advantage over other forms of government*. Selengkapnya di <https://www.britannica.com/video/213436/Questions-answers-democracy> Diakses pada 20 Juni 2022.

⁴ Heywood, A. (2017). *Political ideologies: An introduction*. Macmillan International Higher Education.

⁵ Hirst, J. (2002). The Distinctiveness of Australian Democracy. *Quadrant*, 46(12), 19-27.

demokrasi bukanlah untuk memilih wakil-wakil yang melaksanakan kehendak rakyat, tetapi untuk memilih individu-individu yang [akan] memerintah atas nama rakyat.⁶

Jadi bisa disimpulkan secara sederhana, bahwa demokrasi adalah doktrin pemerintahan *for the people, by the people and of the people*. Poinnya adalah demokrasi bernilai karena mengedepankan partisipasi public secara luas dan berkelanjutan sehingga mampu mengekspresikan dua nilai utama yakni kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*) (Wolff, 2006)⁷

B. Sejarah Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah kata yang berusia lebih dari 2500 tahun. Banyak kalangan menilai demokrasi diciptakan pertama kali di Yunani sekitar tahun 500 SM— namun bukti menunjukkan bahwa pemerintahan demokratis, dalam arti luas, ada di beberapa wilayah di seluruh dunia, jauh sebelum pergantian abad ke-5. Masuk akal untuk mengasumsikan bahwa demokrasi dalam satu atau lain bentuk muncul secara alami dalam kelompok-kelompok suku primitif. Asumsi ini telah didukung oleh studi bahwa masyarakat suku tertentu menunjukkan bahwa pemerintahan demokratis ada di antara banyak kelompok suku primitif selama ribuan tahun sebelumnya.⁸ Kemudian, sekitar 500 SM, kondisi yang mendukung demokrasi muncul kembali di beberapa tempat, dan beberapa kelompok kecil mulai membentuk pemerintahan berbasis rakyat. Bisa dikatakan, nilai nilai demokrasi diciptakan kembali dalam bentuk yang lebih maju.

⁶ Schumpeter, J. A. (2013). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Routledge.

⁷ Wolff, J. (2006). *An Introduction to Political Philosophy*, Revised Ed. Oxford University Press, Oxford.

⁸ Britannica. 2021. *Know about democracy, its history, and advantage over other forms of government*. Selengkapnya di <https://www.britannica.com/video/213436/Questions-answers-democracy> Diakses pada 20 Juni 2022.

Perkembangan paling krusial terjadi di dua wilayah Mediterania, yakni Yunani kuno dan Roma.

Sejak zaman Yunani kuno, baik teori maupun praktik demokrasi telah mengalami perubahan. Jadi, selama ribuan tahun berbagai jenis demokrasi telah dipraktekkan. Selama periode klasik (kira-kira abad ke-4 dan 5 SM), Yunani tentu saja bukan sebuah negara dalam pengertian modern, melainkan kumpulan dari beberapa ratus negara kota yang independen. Pada 507 SM, di bawah kepemimpinan Cleisthenes, warga Athena mulai mengembangkan sistem pemerintahan rakyat yang berlangsung selama hampir dua abad. ketika demokrasi pertama kali ditemukan, di Athena, ciri paling menakjubkan dari bentuk pemerintahan baru ini adalah bahwa orang miskin diizinkan untuk berpartisipasi bersama orang kaya dalam menentukan nasib daerah (negara kota) termasuk juga menentukan apakah akan berperang; bagaimana mendistribusikan hasil dari tambang perak; serta penghukuman mati seorang narapidana.⁹ Di Athena kuno, semua warga laki-laki bisa berkumpul bersama di majelis untuk memberikan suara pada isu-isu semacam ini.

Pada waktu yang hampir bersamaan dengan diperkenalkannya pemerintahan rakyat di Yunani, di Semenanjung Italia secara khusus di kota Roma. Bangsa Romawi menyebut sistem mereka sebagai *respublica*, atau republik, dari bahasa Latin *res*, yang berarti hal atau urusan, dan *publicus* atau *publica*, yang berarti publik. Dengan demikian, ide dasar tentang republik adalah milik orang Romawi (*populus romanus*). Di Roma kuno, sebaliknya, konsep awal republik Roma juga membentuk rezim "campuran" di mana beberapa jabatan dipegang oleh orang kaya dan beberapa oleh perwakilan orang miskin. Alih-alih menyatukan semua orang dalam satu kelompok pengambilan keputusan, orang Romawi mencoba

⁹ Allen, D. (2022). *Introduction: What Is Democracy?*. Selengkapnya di <https://demo.democracyweb.org/Introduction-What-Is-Democracy> Diakses pada 20 Juni 2022.

menyeimbangkan kepentingan si kaya dan si miskin dengan memberi mereka peran yang berbeda dalam sistem politik.¹⁰

Meskipun demikian, baik Athena (Yunani) maupun Roma memahami bahwa mereka telah membangun sistem politik yang bertumpu pada suara rakyat dan yang menjamin kebebasan sebuah badan warga negara yang bebas dan setara. Konsep pemerintahan seperti ini juga dipandang cukup kuat untuk melindungi diri dari sumber dominasi luar dan juga berkomitmen untuk aturan hukum untuk melindungi semua warga negara dari dominasi satu sama lainnya. Bentuk pemerintahan demokratis dan republik kuno tersebut masing-masing mulai memudar ketika Alexander Agung menaklukkan Athena dan ketika Julius Caesar menggulingkan Romawi dan mengubahnya menjadi sebuah kerajaan dan dipimpin oleh seorang kaisar. Namun, demokrasi kemudian dihidupkan kembali di negara-kota Italia pada periode modern awal dan kemudian dalam bentuk modernnya dijalankan kembali dengan Revolusi Amerika pada tahun 1776.¹¹

Kebangkitan demokrasi modern telah memberi dua belas konsep kunci yang tidak dimiliki oleh demokrasi tradisional/kuno, yakni: (1) Persetujuan dari Yang Diperintah; (2) Pemilu yang Bebas; (3) Konstitusi memiliki batasan; (4) Aturan Mayoritas dan Hak Minoritas; (5) Transparansi dan Akuntabilitas; (6) Sistem Multipartai; (7) Kebebasan Ekonomi; (8) Aturan Hukum; (9) Hak Asasi Manusia; (10) Kebebasan Berekspresi; (11) Kebebasan Berserikat; dan (12) Kebebasan Beragama.¹² Secara bersama-sama, kedua belas konsep ini adalah embrio awal bangunan demokrasi modern atau

¹⁰ Allen. D. (2022). *Introduction: What Is Democracy?*. Selengkapnya di <https://demo.democracyweb.org/Introduction-What-Is-Democracy>. Diakses pada 20 Juni 2022.

¹¹ Allen. D. (2022). *Introduction: What Is Democracy?*. Selengkapnya di <https://demo.democracyweb.org/Introduction-What-Is-Democracy>. Diakses pada 20 Juni 2022.

¹² Allen. D. (2022). *Introduction: What Is Democracy?*. Selengkapnya di <https://demo.democracyweb.org/Introduction-What-Is-Democracy>. Diakses pada 20 Juni 2022.

demokrasi perwakilan. Demokrasi zaman modern sudah terlalu besar untuk semua warga negara berkumpul bersama untuk memutuskan masalah negara dan kepentingan publik.¹³

Demokrasi modern berbeda dari varian demokrasi tradisional/kuno dalam jenis institusi yang diciptakan untuk mengamankan hak-hak rakyat. Beberapa aspek penting dalam menciptakan kondisi ini adalah termasuk konstitusi tertulis yang mengidentifikasi kekuasaan pemerintah dan bagaimana mereka harus digunakan serta batasan kekuasaan tersebut. Pengakuan bahwa dalam konstitusi perlu melindungi minoritas dari kekuasaan yang dipegang oleh mayoritas; serta pembentukan partai politik secara formal dengan platform ideologi dan kepentingannya masing-masing. Konsep ini memiliki tujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan sehingga kekuasaan itu, pada akhirnya, tetap berada di tangan rakyat!¹⁴

Selama abad ke-20, jumlah negara yang memiliki lembaga politik yang demokratis meningkat secara signifikan. Pada awal abad ke-21, para pengamat independen sepakat bahwa lebih dari sepertiga negara-negara merdeka memiliki lembaga-lembaga demokrasi. Secara keseluruhan, negara-negara demokratis dan hampir demokratis ini terdiri dari hampir setengah populasi dunia. Apa yang menyebabkan ekspansi cepat demokrasi?

Bagian penting dari penjelasannya adalah bahwa semua alternatif ideologi selain demokrasi—baik yang berasal dari zaman kuno maupun modern—mengalami kegagalan baik secara politik, ekonomi, diplomatik, dan militer yang sangat mengurangi daya tariknya. Dengan kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia I, sistem kuno monarki, aristokrasi, dan oligarki tidak lagi populer digunakan. Menyusul kekalahan militer Italia dan Jerman dalam Perang Dunia II, menjadikan alternatif

¹³ Dahl, R. A. (2020). *On democracy*. Yale university press; Dahl, R. A. (2008). *Democracy and its Critics*. Yale university press.

¹⁴ Allen. D. (2022). *Introduction: What Is Democracy?*. Selengkapnya di <https://demo.democracyweb.org/Introduction-What-Is-Democracy>. Diakses pada 20 Juni 2022.

ideologi dan sistem fasisme juga ikut ditinggalkan. Komunisme setelah keruntuhan ekonomi dan politik Uni Soviet pada 1990-1991 juga semakin tidak populer. Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan kediktatoran yang marak terjadi di Amerika Latin yang berlandaskan nilai-nilai sosialisme marxisme pada 1980-an dan 1990-an.

Faktor lainnya, ekonomi yang sangat terpusat di bawah kendali negara/pemerintah pusat telah memungkinkan para pemimpin politik untuk menggunakan akses secara bebas terhadap sumber daya ekonomi untuk memberi penghargaan kepada sekutu/aliansi serta menghukum para pengkritiknya. Karena sistem ini digantikan oleh pasar (*market*), kekuatan dan pengaruh pejabat tinggi pemerintah menurun. Selain itu, beberapa kondisi yang penting bagi keberhasilan berfungsinya ekonomi pasar juga berkontribusi pada perkembangan demokrasi. Antara lain, misalnya akses informasi yang dapat diandalkan, tingkat pendidikan, kemudahan pergerakan dan mobilitas, dan supremasi hukum. Ketika ekonomi pasar berkembang dan ketika kelas menengah tumbuh lebih besar dan lebih berpengaruh, dukungan rakyat untuk kondisi seperti itu meningkat, seringkali disertai dengan tuntutan untuk demokratisasi.

Perkembangan ekonomi pasar juga berkontribusi pada penyebaran demokrasi dengan cara lain. Ketika kesejahteraan ekonomi sebagian besar penduduk dunia berangsur-angsur membaik, demikian pula kemunculan lembaga-lembaga demokrasi semakin banyak dan berkembang. Dengan demikian, kemakmuran ekonomi yang meluas di suatu negara sangat meningkatkan kemungkinan keberhasilan pemerintahan yang demokratis, sedangkan kemiskinan yang meluas sangat meningkatkan kemungkinan kegagalannya.

Dibandingkan dengan negara-negara otokratis dan non-demokratis, pemerintah demokratis menjamin hak-hak dasar individu dan kebebasan pribadi yang lebih luas, memungkinkan tingkat kesetaraan politik yang relatif tinggi, mendorong kualitas hidup yang lebih baik bagi warga, dan cenderung

menghindari konflik besar terbuka (perang atau agresi militer).¹⁵ Ciri demokrasi yang sebenarnya adalah memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan publik. Agar partisipasi seperti itu menjadi bermakna dan efektif, warga negara harus dididik untuk lebih memahami kepentingan mereka sendiri secara kritis.¹⁶

Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia berjalan sangat fluktuatif dan dinamis. Pergantian system pemerintahan turut mempengaruhi corak demokrasi yang digunakan. Bergantinya system demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai reformasi berlangsung secara dinamis dan politis. Mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai pada munculnya demokrasi modern memperlihatkan bahwa betapa dominannya peranan (pemerintahan) negara dalam memberikan warna terhadap system demokrasi di Negara Indonesia.¹⁷

Pergolakan politik turut mempengaruhi corak demokrasi yang digunakan. Perubahan perubahan esensial dan penyesuaian sistem demokrasi mulai dari demokrasi pancasila. demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer sampai kedemokrasi presidensial. Namun sebenarnya, pengaruh pemerintah pusat dalam menjalankan sistem demokrasi masih dominan. Meskipun upaya-upaya perbaikan terus dilaksanakan dengan amandemen dan perubahan konstitusi namun masih

¹⁵ Britannica. 2021. *Know about democracy, its history, and advantage over other forms of government.* Selengkapnya di <https://www.britannica.com/video/213436/Questions-answers-democracy> Diakses pada 20 Juni 2022.

¹⁶ Britannica. 2021. *Know about democracy, its history, and advantage over other forms of government.* Selengkapnya di <https://www.britannica.com/video/213436/Questions-answers-democracy> Diakses pada 20 Juni 2022.

¹⁷ Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).

saja kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya.¹⁸

Berbagai macam predikat dan pelabelan demokrasi telah disebutkan seperti liberal, terpimpin, sentralisme/terpusat, rakyat, presidensial, nasional dan Pancasila. Penyesuaian istilah tersebut menunjukkan bahwa *branding* demokrasi telah disesuaikan dengan citra dan tujuan setiap rezim pemerintahan. Tentu juga disesuaikan dengan prioritas perumus dan penggunaannya. Di Indonesia, lazim penerapan demokrasi disandingkan dengan Pancasila. Konsep ini sebenarnya sangat ideal dimana kekuasaan rakyat dikombinasikan dengan tata cara hidup masyarakat Indonesia yang juga sekaligus merupakan pandangan hidup bangsa. Tujuannya jelas, agar ideologi yang digunakan sesuai dengan keadaan, kebudayaan dan cita-cita hidup masyarakat Indonesia.

Kombinasi ini juga membuat demokrasi tetap menarik karena memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat secara adil dan terbuka untuk memberikan suara (*voting*) dalam mengungkapkan apa keinginan mereka. *Voting* tersebut bisa dilaksanakan dalam pemilu maupun secara langsung menyampaikan kritik dan saran bagi pemerintah. Demokrasi sebagai suatu system yang menginginkan kebaikan bersama (*common good*) selalu menarik untuk dinarasikan. Esensi pemilihan umum bukan saja secara teknis memilih pemimpin yang terbaik namun juga bisa sebagai sarana aspirasi, sarana kontrol dan sarana "penghukuman" rakyat terhadap elit negara. Intinya, justifikasi apa yang diinginkan rakyat bisa diwujudkan dalam sistem demokrasi secara adil dan terbuka.¹⁹

¹⁸ Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).

¹⁹ Wahyudi, A. (2014). Radikalisme Demokrasi: Catatan Pengantar. *Jurnal Filsafat*, 24(1), 1-13.

C. Praktik-praktik Utama Demokrasi

Dalam demokrasi, rakyatlah yang memegang kekuasaan berdaulat atas pembuat undang-undang dan pemerintah. Demokrasi adalah pemerintahan dimana kekuasaan dan tanggung jawab sipil dilaksanakan oleh semua warga negara, secara langsung atau melalui wakil-wakil mereka yang dipilih secara bebas. Demokrasi adalah seperangkat prinsip dan praktik yang melindungi kebebasan manusia. Demokrasi bertumpu pada prinsip-prinsip kekuasaan mayoritas, ditambah dengan hak-hak individu dan minoritas.²⁰

Masyarakat demokratis berkomitmen pada nilai-nilai toleransi dan keterbukaan. Demokrasi mengakui bahwa mencapai konsensus membutuhkan kompromi dan hal itu mungkin tidak selalu dapat dicapai. Mahatma Gandhi menyatakan bahwa "intoleransi itu sendiri merupakan bentuk kekerasan dan hambatan bagi tumbuhnya semangat demokrasi sejati."²¹

Seperti yang diusulkan oleh Robert Dahl, Schmitter dan Karl, dan Larry Diamond terkait praktik-praktik utama dan wajib ada dalam sistem demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Kontrol atas keputusan pemerintah.
2. Pejabat yang dipilih tidak menggunakan instrumen kekerasan namun melalui mekanisme pemilu.
3. Warga negara memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu.
4. Warga negara memiliki hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan di pemerintahan.
5. Warga negara memiliki hak untuk mengekspresikan diri
6. Warga negara memiliki hak untuk mencari sumber informasi alternatif dan dilindungi undang-undang.

²⁰ Principle of Democracy. (2022). *Overview: What is Democracy*. Selengkapnya di <https://www.principlesofdemocracy.org/what> Diakses pada 17 Juni 2022.

²¹ Principle of Democracy. (2022). *Overview: What is Democracy*. Selengkapnya di <https://www.principlesofdemocracy.org/what> Diakses pada 17 Juni 2022.

7. Warga negara juga memiliki hak untuk membentuk asosiasi atau organisasi yang independen, termasuk LSM, organisasi sosial dan keagamaan, partai politik dan kelompok kepentingan.
8. Orang-orang memiliki kebebasan untuk berbicara dan mempublikasikan pandangan yang berbeda.

Demokrasi mengontrol pemerintah pusat untuk tidak berkuasa secara penuh dan mendesentralisasikan termasuk kepada pemerintah tingkat regional dan lokal, agar pemerintahan dapat diakses serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu fungsi utama demokrasi adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil secara teratur dan terbuka untuk semua warga negara. Pemilu dalam demokrasi merupakan kompetisi otentik untuk mendapatkan dukungan rakyat.²² Demokrasi juga beragam, mencerminkan kehidupan politik, sosial, dan budaya masing-masing negara yang unik. Demokrasi bersandar pada prinsip-prinsip fundamental, bukan praktik yang seragam.²³

²² Principle of Democracy. (2022). *Overview: What is Democracy*. Selengkapnya di <https://www.principlesofdemocracy.org/what> Diakses pada 17 Juni 2022.

²³ Principle of Democracy. (2022). *Overview: What is Democracy*. Selengkapnya di <https://www.principlesofdemocracy.org/what> Diakses pada 17 Juni 2022.

Daftar Pustaka

- Allen, D. (2022). *Introduction: What Is Democracy?*. Selengkapnya di <https://demo.democracyweb.org/Introduction-What-Is-Democracy> Diakses pada 20 Juni 2022.
- Britannica. 2021. *Know about democracy, its history, and advantage over other forms of government*. Selengkapnya di <https://www.britannica.com/video/213436/Questions-answers-democracy> Diakses pada 20 Juni 2022.
- Crick, B. (2002). *Democracy: A very short introduction*. OUP Oxford.
- Dahl, R. A. (2020). *On democracy*. Yale university press; Dahl, R. A. (2008). *Democracy and its Critics*. Yale university press.
- Heywood, A. (2017). *Political ideologies: An introduction*. Macmillan International Higher Education.
- Hirst, J. (2002). The Distinctiveness of Australian Democracy. *Quadrant*, 46(12), 19-27.
- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- Kaban, R. (2003). Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara. *Perspektif*, 8(4), 290-302.
- Principle of Democracy. (2022). *Overview: What is Democracy*. Selengkapnya di <https://www.principlesofdemocracy.org/what> Diakses pada 17 Juni 2022.
- Schumpeter, J. A. (2013). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Routledge.
- Wahyudi, A. (2014). Radikalisasi Demokrasi: Catatan Pengantar. *Jurnal Filsafat*, 24(1), 1-13.
- Wolff, J. (2006). *An Introduction to Political Philosophy*, Revised Ed. Oxford University Press, Oxford.

Tentang Penulis



Dr. Andi Tenri Somba, SIP., M.Si; lahir di Ujung Pandang, 21 Mei 1976. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, S1 Program Studi Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin Makassar, S2 Program Studi

Sosiologi Politik di Universitas Airlangga Surabaya dan S3 Program Studi Ilmu Politik di Universitas Indonesia Jakarta. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dan menjabat Lektor pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekretaris pada Program Doktor Studi Pembangunan ULM serta Direktur Center for Election and Political Party University Link Universitas Lambung Mangkurat (CEPP ULM). Pernah menjadi tenaga edukatif di beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Pancasakti Makassar, Universitas Widya Kartika Surabaya dan Universitas Islam Kalimantan Selatan.

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202260646, 2 September 2022

Pencipta
Nama : Ahmad Mustanir, Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si dkk
Alamat : Jl. Ahmad Taufik No 50 Rappang, Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang, SULAWESI SELATAN, 91651
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Ahmad Mustanir, Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si dkk
Alamat : Jl. Ahmad Taufik No 50 Rappang, Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang, SULAWESI SELATAN, 91651
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : Pengantar Ilmu Pemerintahan
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 24 Agustus 2022, di Purbaingga
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000376380

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Ahmad Mustanir	Jl. Ahmad Taufik No 50 Rappang Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan
2	I. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si.	Jl. Andi Sulolpu No. 28 Rappang Kecamatan Panca Riang Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan Kode Pos 91651
3	Muhammad Iqbal	Jl. Poros Pinrang, Kelurahan Barani Mario, Kecamatan Barani Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan
4	Muhammad Arif, S.IP., M.I.K	Jl. Griya Gg Swadaya No 3 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau
5	Sumardi, S.Ip., M.I.P	Tokka, Alahanuae, Sinjai Utara, Sinjai, Sulawesi Selatan
6	Rufida Yuniarsh	Jl. H.R.A. Rahman Gg. Bandahara No.8 Pontianak
7	Itak Wicaksono	Perum Muktiad Blok AC-11 Jember
8	Feri Wicaksono	Dk. Ngebuk RT. 04 RW. 07 No. 70, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57167
9	Amir Syamsuadi, S.IP., M.Si	Perum Griya Seta Makmur, Blok B 05 No 07 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau
10	Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si	Jl. Anoa No. 14 D Kelurahan Wala Kecamatan Maritonggae Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan Kode Pos 91651
11	Erfina	Jl. Musika Rappang, Sidrap
12	Yusuf Adam Hilman, S.I.P., M.Si	Perum ASABRI Blok A3 Pjeran Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Indonesia
13	Andi Terri Sempa	Komp. Perdagangan Permai II No. 21 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
14	Muhammad Lutfi	Graha Bongki Permai I Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
15	Irfan Nurselawati, S.Pd., M.Pd., M.Si	Lingkungan Rungki RT. 01 RW. 03 Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis 46212

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Ahmad Mustanir	Jl. Ahmad Taufik No 50 Rappang Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan
2	I. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si.	Jl. Andi Sulolpu No. 28 Rappang Kecamatan Panca Riang Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan Kode Pos 91651
3	Muhammad Iqbal	Jl. Poros Pinrang, Kelurahan Barani Mario, Kecamatan Barani Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan
4	Muhammad Arif, S.IP., M.I.K	Jl. Griya Gg Swadaya No 3 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau
5	Sumardi, S.Ip., M.I.P	Tokka, Alahanuae, Sinjai Utara, Sinjai, Sulawesi Selatan
6	Rufida Yuniarsh	Jl. H.R.A. Rahman Gg. Bandahara No.8 Pontianak
7	Itak Wicaksono	Perum Muktiad Blok AC-11 Jember

8	Feri Wicaksono	Dk. Ngebuk RT. 04 RW. 07 No. 70, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57167
9	Amir Syamsuadi, S.IP., M.Si	Perum Griya Seta Makmur, Blok B 05 No 07 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau
10	Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si	Jl. Anoa No. 14 D Kelurahan Wala Kecamatan Maritonggae Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan Kode Pos 91651
11	Erfina	Jl. Musika Rappang, Sidrap
12	Yusuf Adam Hilman, S.I.P., M.Si	Perum ASABRI Blok A3 Pjeran Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Indonesia
13	Andi Terri Sempa	Komp. Perdagangan Permai II No. 21 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
14	Muhammad Lutfi	Graha Bongki Permai I Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
15	Irfan Nurselawati, S.Pd., M.Pd., M.Si	Lingkungan Rungki RT. 01 RW. 03 Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis 46212





☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

